

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi kian maju. Banyak media-media elektronik dan media cetak berlomba-lomba untuk merevolusi tampilan baru mereka menjadi berbasis internet guna memenuhi kebutuhan komunikasi setiap individu. Adanya internet sangat mempermudah kegiatan manusia, selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai sarana jual beli guna mencari keuntungan, dan juga sarana sebagai kegiatan politik negara. Ada berbagai hal-hal yang bisa dilakukan dengan adanya internet, seperti untuk berbagi informasi, berinteraksi secara tidak langsung, mengekspresikan diri, menyampaikan kritik dan pendapat, bahkan hingga mencari tambahan penghasilan. Informasi dan sesuatu yang ingin kita ketahui atau kita cari akan dapat ditemukan melalui internet (Kurmia, 2005).

Dilihat dalam bentuk fisiknya, internet terlihat seperti jaring laba-laba yang mengitari bola dunia. Jaring-jaring yang terlihat tersebut, berada di titik-titik yang saling berkaitan satu sama lain. Sebuah kota digital yang sangat luas dan sangat besar, cocok untuk menganalogikan internet. Dalam kota digital tersebut, setiap penduduk yang tinggal memiliki sebuah alamat, dimana alamat tersebut yang berguna sebagai sarana mereka dalam bertukar informasi. Analogi lainnya yang merepresentasikan internet yaitu sebuah Gedung/perpustakaan yang didalamnya terdapat data-data informasi yang lengkap dan jumlahnya sangat banyak. Internet memiliki kelebihan karena tidak memiliki batasan ruang dan waktu, mudah diakses, kecepatan persebaran informasinya secara masif, dan juga dapat membuat kemampuan untuk berkumpul dan memberikan pendapat secara bebas masyarakat meningkat (Tabroni, 2012).

Internet terus berkembang hingga akhirnya melahirkan media baru atau *new media* (Ride, 2006). Media baru berbasis internet, teknologi, berkarakteristik fleksibel, memiliki potensi yang interaktif, serta berfungsi pada ruang publik maupun privat (Mondry, 2008). McQuail (2000) menyatakan, Penggunaan media

baru lebih bersifat individual dan bukan bersifat interaksi sosial secara langsung. Media baru juga memiliki tingkat kebebasan dan tingkat kesenangan dalam penggunaannya. McQuail dalam bukunya *Teori Komunikasi Massa* (2011), menyatakan bahwa karakteristik yang utama pada media baru yaitu adanya akses yang saling berhubungan dengan khalayak individu yang mana khalayak dapat berperan sebagai penerima dan juga pengirim pesan, memiliki karakter keterbukaan, dan memiliki sifat dapat berada dimana saja (Putri, 2018). Media baru merupakan sebutan untuk media yang berbeda dari sebelumnya, yaitu Media lama. Media lama merupakan media komunikasi tanpa internet seperti televisi, radio, majalah, dan koran. Yang mana kini sudah banyak ditinggalkan karena adanya teknologi internet.

Berdasarkan penjabaran media baru di atas, media sosial merupakan kata yang lebih dikenal luas sebagai representasi dari media baru ini. *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, dan *TikTok* adalah contoh bagian dari media sosial sebagai buah dari perkembangan teknologi internet. Media sosial marak sekali digunakan oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Media sosial memiliki fitur yang sangat menarik, di sana terdapat banyak foto, video, dan musik. Selain itu, konten dan informasi dalam *platform* media sosial selalu ada yang baru dan tidak ada habisnya, sehingga seolah mampu menarik manusia untuk hidup di dalamnya.



Gambar 1. 1 Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia (2015-2022)

Berdasarkan data laporan *We Are Social* yang dikutip melalui DataIndonesia.id, terlihat bahwa di Indonesia pengguna yang aktif menggunakan media sosial mencapai hingga 191 juta pada bulan Januari tahun 2022, yang mana jumlah tersebut diketahui telah mengalami lonjakan sebanyak 12,35% dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 170 juta pengguna. Dengan begitu media sosial dianggap sangat berpengaruh sekali untuk mendapatkan atensi publik. Maka tidak heran jika banyak sekali yang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyukseskan kepentingan mereka. Media sosial memiliki sifat yang terbuka dan mudah diakses. Siapa pun dari golongan apapun dapat menggunakan media sosial. Di samping kelebihanannya, Pola penyebaran informasi yang ada di media sosial sifatnya adalah bebas dan dapat disebar oleh siapapun, oleh karena itu informasi-informasinya bisa saja tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga pengguna media sosial yang menelan informasi secara mentah sering kali terlena dan menciptakan isu-isu hoaks. Untuk itu dalam menggunakan media sosial walaupun dapat digunakan oleh semua orang, namun harus memiliki batasan diri.

Demokrasi adalah sistem yang dianut oleh Negara Indonesia, yang mana masyarakat harus ikut serta dalam kegiatan politik negara. Masyarakat harus ikut serta menyuarakan pendapatnya dan ikut serta dalam kegiatan kenegaraan dengan tidak membedakan hak dan kewajiban seluruh individu. Keikutsertaan masyarakat itu disebut dengan partisipasi politik. George Moyser menyebutkan bahwa jantungnya demokrasi adalah partisipasi warga negara. Dikatakan demikian karena tidak bisa disebut dengan demokrasi yang sesungguhnya apabila tiada suara dari masyarakat. Partisipasi politik tentu memerlukan ruang publik sebagai sarana berkumpul dan berinteraksi masyarakat. Maka dari itu dengan adanya media baru berbasis internet ini mampu memberikan kontribusi yang besar bagi sistem demokrasi Indonesia. Media sosial memberikan ruang publik baru secara virtual tanpa Batasan ruang dan waktu. Dengan begitu tidak ada hambatan untuk menyuarakan aspirasi. Peradaban baru komunikasi lahir karena ruang publik yang telah diciptakan oleh media baru, hingga muncul beberapa terminologi baru, yaitu

seperti istilah *cyberdemocracy*, *cyberprotest*, dan *new publik sphere* guna menautkan gagasan, pemikiran, dan partisipasi politik (Tosepu, 2017).

Media sosial sebagai sarana komunikasi politik lebih transformatif dibandingkan dengan media konvensional, karena media konvensional seperti yang sering digunakan yaitu televisi, dianggap sudah asing dari cita-cita ruang publik yang sebenarnya. Kini media televisi lebih berkubu untuk memperjuangkan kepentingan elite-elite politik saja. Selain itu, di media televisi yang dapat terlibat di dalam diskusi politik hanya elite-elite penguasa, pejabat publik, dan para petinggi partai politik. Dengan krisis ruang publik yang ada pada media konvensional televisi itulah yang membuat teknologi media baru berbasis internet lebih banyak digunakan. Maka dari itu ruang publik sangatlah penting guna mengetahui dan menyampaikan aspirasinya mengenai kebijakan-kebijakan yang ada. Ruang publik merupakan wadah warga negara untuk dapat berinteraksi dan saling berpendapat agar kepentingan Bersama mereka bisa tercapai. Oleh karena itu masyarakat berbondong-bondong menyerbu ruang publik manakah yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kaidah kebebasan dalam Negara demokrasi,

Media baru sebagai sarana Demokratisasi terus berkembang, dimulai dari membentuk ruang publik hingga menjadi aksi politik. Aksi politik adalah wajah dari kebebasan politik dan komunikasi. Kini pemerintah semakin membuka ruang publik melalui media baru guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. dengan begitu, akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat adalah indikator dari implementasi penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi oleh rakyat dalam pesta demokrasi. Dengan tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat, maka terlihat bahwa mereka mengikuti, memahami, dan turut melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Dengan begitu pemerintah akan lebih mudah dalam memahami apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setelah terbentuknya Partisipasi politik dalam ruang publik di media sosial tersebut, maka akan muncul aksi politik seperti yang disebutkan diatas. Aksi politik dalam media sosial biasanya berbentuk kenaikan tagar mengenai isu-isu yang sedang

diperbincangkan. Dengan hal tersebut, media sosial memang memberikan ruang publik yang baik sesuai dengan perwujudan kebebasan negara demokrasi.

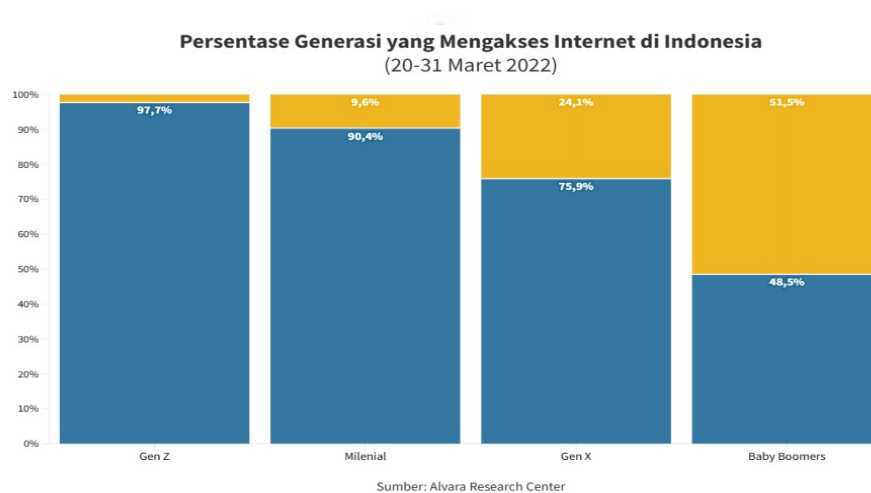
Media sosial dengan sifatnya yang terbuka, secara sadar dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Para politisi melakukan komunikasi politik sekaligus penjarangan masa menjelang Pemilihan Umum. Keberhasilan terpilihnya Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu, adalah cerminan dari *impact* media sosial dalam sistem politik nasional Indonesia. Sebelum itu, kepopuleran Joko Widodo saat menjadi Walikota Kota Solo yang terpandang berprestasi, berhasil mengambil atensi berbagai platform di media sosial. Hal tersebut mendapat respon oleh masyarakat Jakarta dan menarik Joko Widodo ke Jakarta. Kepopuleran Joko Widodo saat itu terbukti mampu meningkatkan elektibilitasnya sehingga beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode, yaitu selama 2014 hingga 2024 mendatang (Karim, 2020).

Media sosial sebagai ruang publik yang menjadi wadah bagi masyarakat dan Lembaga politik dalam proses demokratisasi, telah melewati banyak fenomena-fenomena. Bagi Lembaga politik, media sosial selain sebagai wadah komunikasi politik, juga merupakan wadah kampanye politik dan sarana membangun citra politik, terutama saat momen menuju Pemilihan Umum. Berdasarkan teori dramaturgi Erving Goffman yaitu *Front Stage* dan *Back Stage* atau panggung depan dan panggung belakang. Dalam panggung depan aktor politik akan melakukan pencitraan positif yang dibawakan ke depan masyarakat. Kemudian di panggung belakang panggung aktor politik akan bersantai dan melakukan semua kegiatan yang tersembunyi. Dalam hal ini media sosial sangat cocok digunakan, masyarakat akan mudah tergiur dengan citra suatu aktor politik yang dilihatnya melalui media sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firman Saputra dan Hamdani, terdapat kasus penggunaan media sosial *facebook* sebagai sarana membangun citra politik oleh calon Bupati Akmal Ibrahim sebagai persiapan menghadapi Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Aceh Barat Daya. Akmal Ibrahim membuat postingan di *facebook* yang berisi pesan-pesan keluh kesah dalam hidupnya, terutama saat ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan korupsi. Akmal menyatakan bahwa

dirinya tidak pernah korupsi dan itu hanya tuduhan dengan menyertakan bukti dirinya dibebaskan oleh jaksa tanpa syarat. Pencitraan tersebut membawa pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat hingga timbul rasa kasihan dan berkeinginan untuk memilih Kembali Akmal Ibrahim sebagai Bupati Aceh Barat Daya dalam Pilkada 2017 (Syam, 2018). Dalam kasus tersebut peneliti melihat bahwa media sosial memang sangat berpengaruh dalam pembentukan bagaimana persepsi masyarakat sebagai warga negara dalam menyikapi perpolitikan di Indonesia. Yang mana akan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasi politiknya. Secara umum, aktivitas dan proses perubahan sosial dan politik saat ini Sebagian besar menggunakan media sosial (Dahlgren, 2015) dan juga dalam proses pengambilan kebijakan publik suatu negara.

Metode advokasi digital melalui media sosial, seperti petisi *online*, survei *online*, pengiriman email ke pembuat kebijakan, dan mobilisasi massa secara *online* dan *real-time*, dapat digunakan untuk melibatkan publik dalam perumusan kebijakan. Penggunaan teknologi untuk melibatkan publik dalam transmisi informasi, mobilisasi kelompok, dan pembentukan koneksi pada isu-isu umum untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan dikenal sebagai advokasi digital di era masyarakat informasi ini. Dengan berbagi informasi, bekerja sama, dan berinteraksi secara *real-time*, media sosial dapat membantu organisasi advokasi menarik *stakeholders*. Media sosial yang biasanya digunakan dalam advokasi digital yaitu *Twitter*. Tahapan hierarkis advokasi berbasis media sosial berdasarkan (Saxton, 2014) yaitu ada tiga. Pertama, menjangkau banyak orang. Pada tahap ini menunjukkan upaya komunikasi untuk meningkatkan kesadaran publik dan menjalin koneksi baru dengan menyebarkan pesan pendidikan dan informasi menggunakan fitur *hashtag Twitter*. Kedua, menjaga agar api tetap menyala; pada tahap ini, relasional, interaktif, dan dialog publik digunakan untuk menjaga koneksi dan membangun ikatan dalam jaringan komunitas pendukung. Ketiga, menuju aksi, yaitu mobilisasi publik melalui lobi-lobi akar rumput, petisi *online* atau promosi survei, dan penyebaran pesan dalam bentuk ajakan bertindak yang terencana (Kusumasari, 2022).

Aksi politik yang ada di dunia nyata (secara langsung) dan dunia maya (internet) tidak jauh berbeda. Jika secara langsung dilakukan dengan menggelar aksi turun langsung ke jalan atau yang biasa disebut Demonstrasi, Melalui media sosial masyarakat melakukan aksi politik mereka dengan penaikan tagar isu yang sedang diperbincangkan, mengisi petisi dan survei daring. Untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana persepsi Mahasiswa mengenai media sosial sebagai proses demokratisasi, seperti komunikasi politik, partisipasi politik, hingga aksi politik. Karena mahasiswa termasuk dalam generasi Z, yaitu generasi yang paling banyak mengakses internet terutama media sosial.



Gambar 1. 2 persentase generasi yang mengakses internet di Indonesia

Dilihat dari Data hasil survei Persentase Generasi yang mengakses internet di Indonesia oleh Alvara Research Center pada Juni 2022 yang diakses melalui DataIndonesia.id, bahwa generasi Z menempati persentase tertinggi dalam mengakses internet, yaitu 97,7%. Lebih banyak dibandingkan dengan generasi milenial, Generasi X, dan *Baby Boomers*. Maka dari itu mahasiswa yang umumnya berusia 18-25 tahun termasuk dalam generasi Z yaitu generasi yang paling banyak mengakses internet. Generasi Z adalah generasi yang lahir ditahun 1996 hingga 2009. Oleh karena itu Mahasiswa UIN Sun Gunung Djati cocok untuk penelitian ini.

Selain itu, peneliti menganggap bahwa persepsi Mahasiswa sebagai *Agent of Change* penting dalam kaitannya dengan proses Demokratisasi, karena seperti yang

dijelaskan diatas bahwa Mahasiswa termasuk ke dalam kategori golongan pengguna Media Sosial. Peneliti ingin mempelajari bagaimana mahasiswa menyuarkan aksi politiknya dan menggunakan persepsinya mengenai media sosial melalui media sosial dengan tidak tersulut propaganda dan isu-isu hoaks yang bertebaran di Media Sosial. Sehingga kedepannya dengan memahami persepsi mahasiswa, diharapkan akan mendapat perhatian yang lebih lagi dalam menggunakan media sosial sebagai sarana menguatkan proses demokratisasi di Indonesia.

Peneliti memilih melakukan penelitian terhadap mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung karena mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pernah membuat tagar yang sempat trending di Twitter. Tagar tersebut yaitu #GunungDjatiMenggugat, yang mana tagar tersebut adalah berisikan demonstrasi virtual mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan penolakan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil 2020/2021. Berdasarkan hal tersebut maka UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki potensi dan kekuatan untuk melakukan aksi politik di media sosial bagi kelangsungan demokratisasi. Selain itu UIN Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan *Webometrics Ranking Web of Universitas*, bahwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung menduduki posisi pertama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dengan tiga indikator yaitu *Openness* (keterbukaan publikasi hasil riset berdasarkan citasi tertinggi dan para peneliti universitas), *Excellence* (jumlah citasi tertinggi paper hasil riset universitas), *Visibility* (volume konten dan dampak dari publikasi web). Dengan peringkat tersebut maka dikatakan UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah Universitas yang terpendang sehingga hasil bagaimana persepsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengenai media sosial sebagai penguat demokratisasi dapat dipertimbangkan untuk menggunakan media sosial sebagai proses demokratisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati sebagai kaum muda yang banyak mengakses Media Sosial terhadap Media Baru dalam Proses Demokratisasi di Indonesia ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengenai media sosial sebagai penguat proses demokratisasi, apakah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati setuju atau tidak jika Media Sosial efektif dalam memperkuat proses demokratisasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

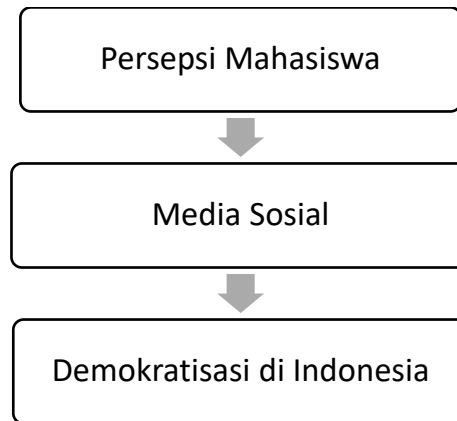
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan politik terutama mengenai media baru dan demokratisasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan mengembangkan ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan dari perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang diimplementasikan dalam karya ilmiah ini. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pembaca tambahan ide, pengetahuan, dan referensi untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi mengenai media sosial sebagai penguat proses demokratisasi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga nantinya diharapkan bisa menjadi acuan pemerintah atau tokoh-tokoh politik dalam mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa mengenai media sosial sebagai penguat proses demokratisasi, sehingga dapat dipertimbangkan apakah efektif melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik di media sosial.

E. Kerangka Berpikir



Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir

Gambar diatas merupakan visualisasi kerangka berpikir dari penelitian ini. Sistem Demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum, dan rakyat telah diakui sebagai yang berkuasa dalam sistem demokrasi setelah amandemen II UUD 1945. Hal ini seperti yang terkandung pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis dan kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Oleh karena itu keikutsertaan rakyat dalam pembuatan kebijakan suatu negara adalah yang terpenting. Keikutsertaan rakyat tersebut disebut dengan partisipasi politik. Dalam mendukung proses demokratisasi juga diperlukan Kerja sama antara rakyat dengan pemerintah dan aktor politik. Oleh karena itu dalam meningkatkan partisipasi politik diperlukanlah komunikasi politik oleh politisi. Dengan adanya komunikasi politik maka akan membuat rakyat ikut berpartisipasi. Terutama dengan adanya Media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *TikTok* yang memudahkan dalam proses demokratisasi. Media baru berbasis internet ini memberikan ruang yang mudah bagi politisi untuk melakukan komunikasi politik dan ruang bagi rakyat untuk menunjukkan partisipasi politiknya secara *online*. Sehingga memperkuat proses demokratisasi di Indonesia.

Mahasiswa sebagai generasi Z yang tidak dapat dipisahkan dengan media sosial. Gen Z adalah generasi yang tumbuh di dunia serba digital ini. Yang termasuk gen Z adalah orang-orang dengan kelahiran pada tahun 1995-2010. Yang mana mahasiswa masuk sebagai kategori gen z ini. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana persepsi Mahasiswa sebagai pengguna media sosial dan salah satu pihak yang aktif dalam melakukan demonstrasi memperjuangkan hak-hak rakyat terhadap adanya media baru sebagai proses demokratisasi di Indonesia. Persepsi mahasiswa ini nantinya akan dikategorikan berdasarkan teori *Encoding-Decoding* oleh Stuart Hall. Teori *encoding-decoding* ini memiliki tiga jenis yaitu *Dominant Hegemonic*, *Negotiated Reading*, dan *Oppositional Reading*

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam melakukan penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang berhubungan dan menjadi sumber inspirasi peneliti dalam membuat tulisan ini, yaitu :

Pertama, penelitian oleh Dyva Claretta, Alifanatul Fauziah, Amalia Nurul Hikmah, Novenda Bunga Aziizah yang berjudul “Analisis Resepsi Mahasiswa tentang Konten dalam Akun TikTok @rizkym_” tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan Teori Encoding-Decoding milik Stuart Hall. Penelitian dengan enam informan tersebut menghasilkan bahwa dua informan masuk dalam posisi *dominant hegemonic position*, dan empat informan lainnya berada dalam kategori *negotiated reading position*. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teori *encoding-decoding* dan sama-sama meneliti persepsi mahasiswa. Sedangkan pembedanya dengan penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya meneliti persepsi mahasiswa UPNVTJT, sedangkan penelitian ini mahasiswa UIN SGD Bandung. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif. Pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada media sosial TikTok sedangkan penelitian ini mencakup Media Sosial secara umum. serta Penelitian sebelumnya meneliti mengenai media sosial

sebagai pandangan mengenai fasilitas kampus UPN “Veteran” Jawa Timur, sedangkan penelitian ini mengenai media sosial sebagai proses demokratisasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Ayu Kade Galuh yang berjudul “Media sosial sebagai strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi” tahun 2016. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Media sosial mampu mendorong representasi Demokratis karena berhasil mendorong isu publik menjadi aksi nyata dan menjadi agenda politik melalui Gerakan lingkungan Bali Tolak Reklamasi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu meneliti media sosial dalam mempengaruhi proses demokrasi. Pembedanya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif. Penelitian sebelumnya meneliti pada kasus Gerakan Bali Tolak Reklamasi, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana persepsi mahasiswa mengenai media sosial sebagai penguat proses demokratisasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jane Theresia Silaban, Yuwanto, dan Lusya Astrika yang berjudul “Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP terhadap Demokratisasi di Indonesia” tahun 2013. penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian sebelumnya adalah mahasiswa menilai bahwa sistem demokrasi sudah sesuai dengan sistem penelitian di Indonesia dan yakin bahwa demokratisasi yang berlangsung di Indonesia telah terlaksana dengan baik, namun mahasiswa masih kurang yakin bahwa demokratisasi di Indonesia dimana telah dilaksanakannya masa transisi dan konsolidasi, telah dapat memperbaiki kondisi pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu meneliti persepsi mahasiswa mengenai Demokratisasi di Indonesia. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif. Pembedanya yaitu Penelitian sebelumnya meneliti persepsi mahasiswa UNDIP sedangkan penelitian ini menggunakan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.